

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI LOKAL YANG RESPONSIF ***DEVELOPING A RESPONSIVE SYSTEM OF LOCAL INFORMATION***

Oleh:

Budi Sayoga

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

(Diterima: 22 Maret 2004, disetujui: 4 April 2004)

ABSTRAK

Rakyat Indonesia sedang berada di tengah cengkaman krisis multidimensi yang kompleks dan rumit. Keresahan sosial merebak di mana-mana, masyarakat merasa belum mencapai apa yang diharapkan. Ironisnya dalam kondisi ini rakyat tidak memiliki sumber informasi yang kredibel dan mampu mendorong tumbuhnya motivasi, inspirasi untuk keluar dari krisis. Keberadaan media massa tidak bisa diharapkan memberikan informasi bagi penguatan khasanah intelektual dan daya kritis publik. Hal ini disebabkan orientasi media yang lebih mengedepankan kepentingan ekonominya. Efeknya rakyat terombang-ambing dalam suasana ketidakpastian. Untuk itu sangat mendesak perlu dibangun suatu sistem informasi lokal yang responsif. Dengan sarana ini diharapkan rakyat akan kembali tumbuh rasa percaya dirinya yang hilang karena kerancuan informasinya. Mereka menjadi tidak mudah terhanyut pada arus yang kontra produktif, anarkhis dan destruktif. Lewat informasi yang sehat diharapkan rakyat mampu menghadapi krisis ini dengan tegar dan percaya diri.

Kata kunci: Informasi, Responsif, Sistem

ABSTRACT

Indonesian people are being hold firmly by a complicated and hard multidimensional crisis. Social unrest is happening everywhere, community feels not to have reached what they hope. Ironically, in this condition the people have no credible information source which can encourage the growth of motivation and inspiration to go out of the crisis. The existence of mass media cannot be expected to give information for strengthening public critical power and intellectual treasury. This is caused by media orientation which is rather putting forward the economic importance. As a consequence, people are oscillated in uncertain situations. For this reason, it is urgently needed to build a responsive system of local information. By this means, it is expected the people will recover their self-confidence that lost by confusion of information. They will not be easily carried by contra-productive, anarchic, and destructive streams. Though the healthy information, it is expected the people are capable to face this crisis rigidly and confidently.

PENDAHULUAN

Seiring dengan maraknya proses reformasi, dinamika komunikasi masyarakat Indonesia tidak luput dari imbasnya. Salah

satu dampak itu berupa dilikuidasinya Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru terlepas dari “dosa” yang dilakukannya, departemen inilah yang bertugas memberikan

pedesaan. Meskipun sarat dengan kepentingan-kepentingan politik saat itu, departemen ini masih cukup bertanggung-jawab memberikan pemahaman-pemahaman tentang aneka issu kepada masyarakat akar rumput. Kondisi itu sedikit banyak memberikan suatu kontribusi terhadap terjadinya pemahaman publik terhadap aneka persoalan yang terjadi di sekelilingnya.

Dengan berbagai macam program-nya, departemen penerangan mencoba menguatkan jargon-jargon pembangunan di benak masyarakat. Penguatan itu menjadikan masyarakat selalu mengetahui akan hadirnya sebuah program dan kemudian berpartisipasi dalam dinamika program tersebut. Meskipun terkesan bersifat top down, monolitik dan hegemonik namun kalau kita mau jujur dengan adanya departemen ini masyarakat lebih memiliki acuan dalam melakukan banyak aktivitas hidupnya. Penerangan dan penyuluhan berbagai macam problema sosial, dilakukan secara terencana dan terjadwal dengan baik. Rakyat mendapatkan asupan informasi yang dapat dijadikan pedoman dan acuan ketika mereka berupaya untuk mengatasi berbagai persoalan hidup.

Kelompok sebagai suatu institusi lokal dibina dan difungsikan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Mereka lebih sadar informasi dan memiliki kemampuan untuk merajut aspirasi kreatif yang dapat diaplikasikan untuk menolong

dirinya manakala menghadapi suatu masalah. Dengan lembaga itu pula dicoba dibentuk suatu sosok masyarakat yang kritis dan sensitif dalam menganalisis suatu persoalan untuk kemudian secara cerdas disusun dan diformulasikan satu solusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal yang ada.

Terlepas dari kenyataan bahwa kemudian lembaga itu menjadi instrumen suatu partai politik di dalam meraih dan mewujudkan kepentingannya, namun kalau dicermati dari perspektif idealnya lembaga itu sangat potensial dan strategis dalam membentuk sebuah sosok masyarakat independen, kritis dan kreatif. Hal ini tercermin dari motto yang dimiliki oleh institusi tersebut yakni “dengar, diskusi, gerak”. Masyarakat disadarkan untuk selalu mendengarkan (baca: memperhatikan) semua informasi yang datang dari media massa. Informasi itu kemudian dipilah dan dipilih, mana sekiranya yang relevan dan bermanfaat bagi lingkungan hidupnya. Informasi yang terpilih itu kemudian didiskusikan secara terbuka dalam forum kelompok, untuk dicoba dicermati apakah substansi informasi itu cukup relevan manakala diaplikasikan pada komunitas itu. Dalam penerapannya dicari lebih lanjut apa kira-kira faktor kesulitan-nya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, apabila kelak informasi itu dipraktekkan. Setelah

lembaga binaan Departemen Penerangan yang kalau difungsikan sebagaimana mestinya akan sangat membantu proses pemberdayaan masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari akses informasi yang sensasional, provokatif dan tidak bertanggungjawab.

Namun kondisi itu hanyalah tinggal kenangan. Seiring dengan ditutupnya Departemen Penerangan, berakibat tidak aktifnya gerak operasional lembaga-lembaga yang menjadi binaannya, termasuk Kelompencapir. Sebagai pengganti Departemen Penerangan, pemerintah yang baru telah membentuk Kementrian Komunikasi dan Informasi, namun sampai saat ini belum jelas apa fungsi dan perannya bagi masyarakat, khususnya masyarakat akar rumput. Kementrian itu belum dapat menunjukkan keberadaannya dalam bentuk pemberdaya-an informasi masyarakat yang mampu menjauhkan rakyat dari kemungkinan mengakses informasi yang “tidak sehat”. Peran kementrian itu belum terlihat secara strategis membangun pola-pola dan model komunikasi dan distribusi informasi yang mampu melindungi masyarakat agar terhindar dari akses informasi yang dapat memerosokkannya dalam perilaku destruktif. Boleh dikata dalam situasi ini masyarakat tidak memiliki sarana untuk menangkis hantaman gelombang informasi-informasi sampah yang menyesatkan.

Ibarat anak ayam kehilangan

induknya, saat ini masyarakat Indonesia kehilangan pegangan dalam pencarian dan pemenuhan kebutuhan informasi yang sehat dan bermakna. Maraknya pertumbuhan jumlah media massa dan sarana komunikasi lainnya tidak berbanding dengan peningkatan kualitas informasi yang diterimanya. Artinya jumlah stasiun TV, Radio, Surat Kabar bertambah, namun informasi yang disajikannya masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Dengan bertambahnya media itu akibatnya justru menjadi sarana semakin merajalelanya informasi-informasi yang tidak produktif dan kondusif bagi tercapainya integrasi sosial. Sehingga informasi tadi tidak membantu bagi terjadinya stabilitas sosial, tertib sosial; namun yang terjadi adalah hal sebaliknya.

Secara riil dapat dikatakan bahwa bangsa ini sedang mengalami hambatan komunikasi, dan hal itu tercermin dalam situasi nyata, sebagai akibat terjadinya arus perubahan yang melanda bangsa dan masyarakat ini. Informasi yang disampaikan sebagian besar media kurang atau bahkan tidak memberikan sumbangan bagi terjadinya penguatan infrastruktur sosial budaya, namun sebaliknya yakni pelemahan dan bahkan penghancuran. Tampilan informasi di media massa jauh dari upaya menyebarkan sistem nilai yang selaras dan sesuai dengan apa yang diangankan dan diinginkan. Keberadaan institusi media tidak memberikan dukungan bagi peningkatan komunikasi demi

menepis dampak informasi dari dunia luar sebagai akibat proses globalisasi. Media massa sebagai salah satu bentuk ruang publik saat ini kurang berisi informasi sosial yang bernilai positif, namun lebih banyak dipenuhi dengan tampilan gambar dan cerita yang sarat dengan muatan kri-minalitas, konsumerisme, bahkan industri pornografi yang sangat kapitalistik.

Industri media menyebabkan media massa lebih berorientasi pada upaya pencarian keuntungan secara maksimal. Maka terjadilah persaingan yang ketat antar media dalam memperebutkan porsi iklan dengan penyajian informasi yang memiliki rating tinggi. Untuk memenangkan persaingan itu, media akan menampilkan sajian pesan yang sesuai dengan selera pasar. Akibatnya tampilan pesan seringkali berbenturan dengan norma agama dan etika. Kapitalisasi media yang berorientasi keuntungan seakan-akan mengesampingkan tatanan norma dan sistem yang berlaku di masyarakat. Liberalisasi informasi yang berangkat dari semangat kapitalisasi tadi, menjadikan racikan informasi hanya semata-mata diolah menarik dan sebanyak mungkin mengundang atensi audience. Semangat yang terbangun adalah semakin banyaknya atensi audience berarti rating acara itu semakin tinggi dan ini berarti porsi kue iklan yang diperoleh semakin besar. Dalam kondisi ini sayangnya industrialis media tidak peduli apa dampak sosialnya. Masyarakat benar-benar diarahkan untuk

memahami pesan yang disampaikan media, yang sebenarnya adalah dunia rekaan sebagai suatu hal yang nyata. Kerangka berpikir masyarakat menjadi rancu dan kurang atau bahkan tidak mampu lagi memahami perbedaan filosofis antara dunia nyata dan dunia rekaan sebagai sebuah tampilan pesan. Yang sebenarnya adalah virtual realty namun oleh audience dipahami dan dirasakan sebagai kenyataan empiris.

Orientasi media tidak lagi menyajikan informasi yang ada dalam realitas objektif secara konsisten melainkan semata-mata hanya menyajikan informasi seperti apa yang diharapkan audiens. Tentu saja kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiasan informasi yang tidak selalu selaras dengan pola normatif yang ada di masyarakat. Dalam setiap tampilan pesannya yang diutamakan adalah daya tarik pesan, dengan harapan agar secara optimal audiens selalu “membeli” program siaran dengan segenap loyalitas dan perhatiannya. Di sinilah perhitungan bisnis yang diutamakan. Pengelola media tidak lagi memperhitungkan biaya sosial yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai konsekuensi mengakses informasi dari media itu. Audiens semata-mata diposisikan sebagai objek informasi dan tidak memiliki hak tawar atas informasi yang diterimanya itu, baik dari aspek substansi, kualitas maupun jenis informasinya.

Hanya untuk mengejar

diutamakan, kriminalitas ditonjolkan dan irasionalitas dikedepankan. Fungsi kultural edukatif yang selama ini dipercayakan pada media massa dalam ikut membangun masyarakat yang beradab, disiplin dan kritis semakin hari semakin terkikis oleh hal-hal yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Liberalisasi media di Indonesia sebagai akibat proses reformasi yang tidak terkontrol, telah menyeretnya ke dalam suasana tanpa adanya itikad untuk melibatkan partisipasi publik dan pengelolaannya. Eksesnya berupa media yang beroperasi tanpa adanya suatu kontrol sosial yang optimal. Media massa sebagai agen perubahan di-tuntut untuk selalu menomorsatukan sajian informasi yang memberikan pencerdasan wawasan pada khalayaknya. Pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya, yakni media mengekspos informasi yang mengarahkan audiens pada hal-hal yang bersifat kontra produktif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa upaya revitalisasi bangsa adalah tugas yang diemban, namun proses pembodohan justru yang dilakukan.

Pengaruh informasi dari media massa memang tidak bersifat linier, dalam arti jika malam ini orang menonton adegan kekerasan lantas besoknya orang itu melakukan tindak kekerasan pula. Namun demikian setidaknya apa yang dilihat orang itu dapat mengendap dalam alam bawah sadarnya dan suatu waktu berpotensi untuk muncul ke permukaan dalam

beragam bentuk, baik itu berupa tindakan imitasi atas sesuatu hal yang ditonton ataupun dalam bentuk sikap permisif atas suatu kondisi yang sebenarnya sangat menyalahi norma sosial (Suwardi, 2002). Bersandar asumsi itu tidak mengherankan jika banyak pihak memprihatinkan dampak negatif siaran televisi pada khususnya dan isi media massa pada umumnya. Seorang pemuka masyarakat di suatu daerah pernah mengatakan bahwa sejak ruang batin dan kesadaran masyarakat dikuasai oleh siaran radio dan televisi, begitu banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang ada menjadi kendur, orang cenderung memberhalakan serba materi dan hubungan personal sangat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan ekonomi semata.

Keprihatinan itu adalah sesuatu yang beralasan, sebab pesan yang disampaikan media massa saat ini memang tidak sekedar mengisi ruang imajinasi melainkan juga acapkali dengan efektif mengikat kesadaran manusia. Beragam tampilan informasi media massa sekarang mulai dari informasi hiburan hingga informasi berita dikemas dengan sangat memikat. Kenyataan itu seringkali menumbuhkan dampak seperti bius yang melenakan (Tester, 2003). Dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, informasi media massa sangat berkemungkinan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang tidak menghendaki

Seorang tokoh abad ini yang cukup dikenal **Ivan Illich** dalam salah satu karyanya dengan tegas mengatakan bahwa dewasa ini begitu banyak kontroversi yang memecah belah masyarakat. Ia bahkan berkeyakinan betapa sumber-sumber alamiah terancam oleh industrialisasi, warisan budaya tercampur dengan komersialisasi, martabat ditumbangkan oleh publisitas, imajinasi dihancurkan oleh kekerasan. Hal itu semua perlahan tapi pasti sudah mulai mengisi celah-celah kehidupan bangsa kita saat ini. Semuanya bersumber dan disebarluaskan oleh media massa yang ada. Boleh dikatakan bahwa media massa melalui informasi yang tersaji telah memerangkap dan memenjarakan kita ke dalam pemiskinan cara berpikir dan berkesadaran.

Bentuk penguasaan pikiran dan kesadaran manusia yang dilakukan oleh informasi media massa, merupakan salah satu bentuk terpenting terhegemoninya ruang batin publik oleh media massa. Perilaku konsumerisme yang ditampilkan oleh media massa misalnya, telah mengkontaminasi alam pikiran manusia dan membuat manusia kehilangan nalar kreatifnya. Kehendak untuk mengkonsumsi pada diri tiap orang seperti halnya dengan kehendak untuk berkuasa (*will to power*), sesungguhnya dapat mendatangkan dampak negatif berupa dua jenis kejahatan, yakni kejahatan karena nafsu itu sendiri dan kejahatan karena pikiran.

Dua jenis penyebab munculnya tindak kejahatan itu, oleh sementara kalangan diyakini bermula dari substansi informasi yang dikemas media massa saat ini. Kejahatan karena hawa nafsu umumnya bermuara pada perkara kriminal atau kasus pidana. Dalam hal ini banyak orang memperkirakan rangsangan yang menyebabkan munculnya tindak pidana itu, karena tampilan informasi media yang sarat dengan muatan kemewahan, pergaulan dan seks bebas, pengkonsumsian zat-zat adiktif, kekerasan dan pelecehan atas anak serta wanita. Sedangkan kejahatan karena pikiran yang umumnya bermuara pada kasus-kasus kejahatan yang menggunakan nalar dan rasio seperti pembobolan kartu kredit lewat belanja melalui internet, korupsi dan kolusi, kejahatan dunia perbankan dan sebagainya, itu juga bersumber dari informasi tentang hal tersebut, yang terlalu sering dimuat di media massa.

Kondisi ini tentu tidak dapat kita biarkan berlarut-larut. Dinamika hidup masyarakat yang semakin hari semakin permisif terhadap pelanggaran norma, etika dan aturan hukum harus dihentikan. Martabat sebagai suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, kebudayaan dan etika harus dikembalikan pada posisi semula dan bahkan harus lebih diperkuat. Erosi moralitas yang disebabkan oleh informasi media massa harus dimini-malisisasi. Ketahanan informasi masyarakat

informasi pada masyarakat ini maka sistem komunikasi harus diproyeksikan dan difungsikan semaksimal mungkin, untuk menggagas dan mentransformasikan diri sebagai saluran yang menyediakan ruang publik yang sebesar-besarnya untuk tujuan pemberdayaan civil society. Sistem komunikasi tersebut sebagai saluran menuju terbentuknya masyarakat yang kritis, cerdas dan selalu memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan etika dan norma sosial, penghormatan atas hak asasi manusia dan penegakkan hukum. Ketahanan informasi yang kuat akan selalu mampu menghindari adanya upaya politik adu domba dari kelompok kepentingan tertentu, yang berupaya memecah belah integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAGIAN INTI

Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks dan rumit. Upaya penyelesaian yang dilakukan terkesan lamban dan tidak ditangani dengan serius. Keresahan sosial merembak di mana-mana, masyarakat belum merasa mencapai apa yang diharapkan. Situasi ini kalau tidak terselesaikan secara tuntas dan komprehensif akan memudahkan terjadinya ketegangan sosial dan dapat mengarah pada terjadinya peledakan politik. Meskipun reformasi politik telah berlangsung hampir 5 tahun tetapi rakyat jarang

sekali dianggap sebagai mitra dialog oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah terkesan masih terbiasa melakukan pola-pola komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yaitu monolog, menceramahi, meng-arahkan, memerintah, memaksa, memanipulasi, menundukkan, menipu dan mengeksploitasi. Dalam monolog pilihan dipersempit dan konsekuensi dikaburkan. Fokusnya terletak pada pesan komunikator (aparatus), bukan pada kebutuhan nyata khalayak (Johannesen, 1994). Rakyat dianggap “benda” untuk dieksploitasi semata-mata demi kepentingan dan keuntungan (politik, ekonomi) si komunikator.

Pemerintah terbiasa memberikan wejangan, anjuran, penerangan (sering berupa kebohongan), instruksi bahkan ancaman terhadap rakyat. Sikap mental “lapisan atas” masyarakat terhadap “lapisan bawah” sudah sedemikian mem-budaya, sehingga hal ini juga mencemari seluruh aktifitas hidup yang ada.

Komunikasi yang dialogis antara aparat penyelenggara negara dengan warga masyarakat jarang terjadi, padahal komuni-kasi jenis ini sangat dibutuhkan. Dalam komunikasi dialogis atau komunikasi dua arah mendengarkan mitra dialog jelas merupakan suatu hal yang penting. Ketidakmauan aparat untuk mendengar suara rakyat ini beresiko, berbahaya dan terkadang menimbulkan akibat yang fatal, khususnya pada dunia ekonomi dan

dialog publik belum dilakukan secara optimal. Aparat pemerintah di pusat umumnya dan di daerah khususnya masih belum tanggap bahkan terkadang menafikan masukan dari lingkungannya.

Para pemimpin pemerintahan di pusat dan di daerah masih belum memiliki kepekaan dalam bentuk persepsi sosial yang akurat dalam menjalankan tugasnya. Persepsi sosial ini mutlak dibutuhkan bagi seorang pemimpin, karena dengan itu ia akan dapat menangkap arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungannya. Tanpa persepsi yang akurat tidak akan mungkin dapat terjalin suatu aktivitas komunikasi dua arah yang efektif. Mereka (pemimpin) tidak dapat melihat permasalahan dan aspirasi masyarakat secara benar dan dampaknya mereka tidak dapat mengevaluasi secara jelas dan tepat atas problema yang ada. Akibat dari itu semua memunculkan perilaku penguasa yang bersifat groupthink, yakni mode berpikir sekelompok orang yang kohesif, yang ditandai dengan beberapa gejala yaitu rasionalitas tindakan yang diputuskan dan ternyata hasilnya tidak optimal. Selain itu mode berfikir ini diwarnai pula keyakinan atas keunggulan moral kelompok, meskipun pada kenyataannya masih perlu dipertanyakan lebih lanjut akan kebenaran-nya. Demikian juga munculnya stereotipe terhadap kelompok luar yang cenderung negatif (pengkritik, pers, rakyat) sebagai jahat, lemah dan bodoh dan

munculnya pembelaan-pembelaan keputusan atas inisiatif kelompok itu sendiri demi melindungi kelompok dan pemimpinnya dari pendapat yang merugikan dan informasi yang tidak diharapkan. Implikasinya adalah semakin termarginalisasinya rakyat dari pusat kekuasaan dan aspirasinya tidak terakomodasi sebagaimana mestinya.

Kondisi ini lebih diperparah ketika keberadaan media tidak memberikan pemihakan kepada masyarakat. Media sebagai institusi yang bertugas untuk melaksanakan fungsi layanan publik (public service) ternyata tidak melaksanakan fungsi itu sebagaimana mestinya. Media lebih berorientasi kepada kepentingan-an dan kebutuhannya sendiri serta mengabaikan tuntutan nurani khalayaknya. Akibatnya media banyak melakukan “dosa dan pengkhianatan” kepada publiknya. Hal itu dapat dilihat dari jenis dan ragam informasi yang ditampilkan. Informasi di media massa saat ini terkesan jauh dari pencerahan wawasan publik, yang dapat membangun ketahanan informasinya. Pesan yang ada cenderung mengekspos hal-hal yang bersifat distorsi informasi, pendramatisasian fakta, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, indoktrinasi, penyalahgunaan kekuasaan dan meng-ganggu privacy. Tentunya kita sepakat bahwa jenis-jenis tampilan ini jauh dari apa yang kita harapkan dalam upaya untuk keluar dari krisis

intelektual publik, mengakibatkan rakyat selalu mengakses dan mengkonsumsi informasi sampah. Rakyat selalu dihadapkan pada informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan akurasi. Fakta itu mengerosi kesadaran publik dan menjadikan rakyat terjebak pada keadaan yang memojokkan-nya pada situasi yang tidak menguntungkan. Rakyat berdiri pada suatu pijakan informasi yang labil, rapuh dan membingungkan. Dampaknya adalah rakyat mengalami distabilitas informasi yang mengarahkan pada situasi frustrasi sosial. Munculnya kondisi frustrasi sosial ini karena masyarakat melihat bahwa apa yang diinginkan tidak dimungkinkan oleh kenyataan sosial (Susanto, 1980).

Kebingungan dan frustrasi sosial inilah faktor penyebab makin lemahnya ketahanan informasi masyarakat. Imbasnya adalah rakyat terombang-ambing dalam suasana yang penuh ketidakpastian, kehilangan daya filtrasi atas informasi yang diterimanya dan mudah terhanyut arus yang bersifat destruktif. Dalam cengkeraman informasi yang tidak akuntabel inilah rakyat melaksanakan aktivitas hidup kesehariannya, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian rakyat mudah sekali dipengaruhi untuk melakukan perilaku main hakim sendiri, terprovokasi untuk terlibat konflik horisontal dan tindakan-tindakan anarkis lainnya.

ASSESSMENT KEBIJAKAN YANG

PERNAH DILAKUKAN

Kecarutmarutan kondisi rakyat karena semakin lemahnya ketahanan informasi masyarakat hingga saat ini belum dibenahi secara strategis dan bermakna. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan ketika masyarakat masih tetap dihadapkan pada informasi media massa yang jauh dari upaya pendidikan moral dan etika. Kontrol sosial atas tampilan informasi media yang dilakukan seakan-akan hanya sekedar angin lalu belaka. Ruang publik dalam bentuk media benar-benar dikuasai oleh kaum kapitalis dengan segala selera dan kepentingan, tanpa mengindahkan upaya crisis recovery dengan sigap dan cermat.

Meskipun ada kementerian informasi dan komunikasi namun eksistensinya tidak jelas misi dan visinya bagi upaya penguatan ketahanan informasi masyarakat. Bentuk dan sifatnya yang non departemen menjadikan keberadaannya tidak didukung aparat yang dapat melakukan aktivitasnya secara optimal sampai ke pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Keadaan itu berbeda ketika sistem komunikasi ditangani oleh Departemen Penerangan, karena didukung oleh aparat di daerah seperti Kanwil dan Kandep, maka aktivitas yang dilakukan dapat cepat merambah sampai di seluruh wilayah Indonesia. Semangat otonomi daerah dan telah dilikuidasinya Departemen Penerangan, menyebabkan tugas-tugas yang selama ini dipercayakan

Proses transisi karena terjadinya alih fungsi dan tanggungjawab itu, atau mungkin karena dianggap proses diseminasi informasi yang bersifat upaya penguatan ketahanan informasi masyarakat dianggap tidak terlalu relevan, sampai saat ini kegiatan yang merupakan revitalisasi ketahanan informasi di banyak propinsi dan daerah tingkat II belum dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi. Forum-forum komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang bersifat konvergen dan sirkuler, seperti apa yang diharapkan terjadi pada institusi kelompencapir, saat ini belum ada penggantian.

Aparat pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten dan kotamadya seringkali menangkap aspirasi masyarakat secara kurang akurat, hal ini ditengarai karena pemerintah belum mengoptimalkan fungsi aparat yang bertugas mengumpulkan informasi dari rakyat. Padahal pemerintah sangat dituntut untuk memiliki basis data dan informasi yang berkualitas, ketika akan menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Apabila informasi yang berkualitas rendah dan tidak akurat ini dijadikan sebagai sebuah dasar pijakan menentukan suatu kebijakan, sangat riskan dan tidak akan menyelesaikan suatu persoalan secara memuaskan.

Pada sisi lain, pemerintah pusat maupun tingkat I dan tingkat II belum memiliki pusat informasi yang dapat diakses oleh siapapun,

dengan menyediakan data dan informasi yang aktual, akurat dan akuntabel. Pusat informasi ini dapat difungsikan secara bersama oleh para stake holder, untuk membangun masyarakat yang lebih well inform. Dengan cara ini, pemerintah dapat membangun suatu jaringan informasi sampai ke tingkat paling bawah (desa). Desain pusat informasi beserta jaringan komunikasi ini belum terlihat keberadaannya sampai sekarang. Adanya pusat informasi dan jaringannya yang bersifat partnership yang semua stake holder terlibat dan bekerja sama di dalamnya akan dapat membangun suatu aktivitas komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan rakyat. Pada gilirannya keberadaan lembaga itu akan dapat membuahkan suatu sistem informasi yang sehat dan tentunya asupan informasi baik yang diterima oleh pemerintah maupun rakyat adalah jenis informasi yang konstruktif, variatif dan bernilai bagi upaya pemberdayaan publik.

Sudah saatnya aparat pemerintah daerah tingkat I dan II, membangun suatu local information system yang responsif terhadap isu di tingkat lokal. Institusi inilah yang belum muncul di tengah kegelisahan publik menghadapi carut marutnya krisis multidimensi yang tengah dihadapinya. Dalam local information system ini agar kinerjanya maksimal, harus melibatkan semua pihak, dalam prinsip kemitraan, dengan tujuan yang dilandasi suatu semangat

INTERPRETASI DAN SOLUSI

Gerakan reformasi nasional yang ditandai dengan semangat demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi telah menimbulkan berbagai dampak, terutama pada lembaga pemerintah, untuk melakukan retrospekti dan reorientasi tentang posisi dan perannya di masyarakat. Sesuai dengan tuntutan reformasi, maka salah satu lembaga, yaitu lembaga atau institusi yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi diharapkan bersifat terbuka, akomodatif dan demokratis terhadap tuntutan masyarakat. Institusi komunikasi yang dikembangkan harus mampu menyeimbangkan antara peranan dan tugas pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu sudah saatnya pelaku komunikasi dan informasi diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengerti akan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Di samping itu, memiliki profesionalisme dan enterpreneurship di dalam membimbing masyarakat melalui community media yaitu media yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sekitar daerah tersebut (narrow casting). Dengan cara inilah diharapkan dapat terbentuk sebuah sistem informasi yang sehat, yaitu suatu sistem informasi yang melibatkan semua stakeholder yang ada di daerah itu untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dan saling memberikan masukan informasi ketika pengambilan kebijakan di tingkat

lokal dilakukan. Bagi aparat pemerintah, secara lebih khusus, media lokal itu dapat dijadikan sarana untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat lokal secara cepat, aktual dan komprehensif. Dengan media lokal ini akan diperoleh banyak informasi yang faktual, yang akan dapat dijadikan pilihan (opsi) manakala membutuhkan rujukan ketika akan mengambil sebuah keputusan, agar segala keputusan yang diambil tidak salah, bersifat objektif dan rasional.

Sebagai upaya pelembagaan secara dinamis, komunikasi sosial yang interaktif dan sinergis ini akan lebih efektif apabila disusun pula suatu jaringan komunikasi sosial (social communication net). Tujuannya selain mengupayakan interaksi, kerjasama, sinergi, juga menarik pelajaran dan mengkonsolidasikan pengalaman, yang akan sangat berguna bagi pengembangan peradaban kita sebagai bangsa. Jaringan komunikasi sosial ini dalam konteks kekinian ketika banyak terjadi konflik horizontal dapat pula dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengantisipasi dan meredam konflik. Dengan adanya jaringan komunikasi sosial ini diharapkan dapat secara sadar mengubah iklim sosial atau lingkungan ke arah situasi yang kondusif bagi kehidupan demokratis dan beradab, yang tertib, tentram, etos kerja tinggi dan sejahtera lahir batin.

Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat maka media komunikasi yang dibutuhkan

mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sekaligus meng-eliminasi kebingungan dan frustasi sosial yang ada. Adapun bentuk responsive local information system itu adalah:

Pengembangan Sistem Komunikasi Konvergen dan Sirkular

Sistem komunikasi konvergen dan sirkular merupakan suatu sistem komunikasi yang tidak bersifat propaganda, tidak bersifat linear atau tidak berlangsung satu arah. Proses komunikasi harus dirancang (desain) secara konvergen dan sirkular. Dalam sistem ini komunikasi tidak tergantung pada komunikator tunggal (hanya pada satu tokoh), tetapi siapapun dia yang memiliki kesempatan dan kompeten, berdedikasi dan kredibel harus diberi akses komunikasi dan kesempatan menjadi komunikator. Dengan cara ini diharapkan akan muncul dan tumbuh gagasan inovatif, kreatif dari arus bawah, samping atau atas, dan dari poros tengah, samping atau bawah. Bagi komunikator yang penting dia memiliki itikad untuk memakai cara-cara komunikasi yang mengedepankan kesejukan, kedamaian, keadilan dan kejujuran. Dengan terbuka, sopan dan saling menghormati, rasional, tidak emosional. Untuk mewujudkan hal itu, maka lembaga komunikasi adat harus diberdayakan, lembaga itu misalnya rembug desa, sarasehan, pengajian dan lain-lain harus

difasilitasi oleh pemerintah agar benar-benar diperankan dan difungsikan sebagai lembaga komunikasi musyawarah, dialogis dan bersifat terbuka.

Pembentukan *Social Communication Net*

Dalam agenda penguatan informasi di tingkat lokal, antar para stake holder yang memiliki kepentingan pada penguatan informasi di tingkat lokal perlu dikoordinasikan secara terpadu dan terarah. Maksud koordinasi di sini bukan sentralisasi dengan ada satu institusi pemerintah atau kelompok resmi yang menjadi focus sentral. Tetapi koordinasi di sini adalah berupa interaksi yang mengarah kerjasama sebagai tim antar para stake holder di tingkat lokal dan pemeran komu-nikasi tersebut atas dorongan masyarakat (community driven). Pendekatan koordinasi bukan bersifat administratif birokratik, melainkan sosiokultural. Hal ini harus dilakukan di mana saja, di tingkat mana saja. Jadi dalam satu kota besar misalnya bisa ada beberapa pengelompokan pemeran komunikasi. Di tingkat kecamatan boleh ada kelompok koordinasi dan mereka tidak usah lapor atau accountable pada kelompok koordinasi di Kabupaten. Jadi tiap-tiap dan semua kelompok koordinasi, accountable pada publik di wilayah jangkauannya masing-masing (Hamijoyo, 2001). Ini semua untuk menjamin berlangsungnya interaksi dialogis antara stake holder di tingkat lokal

communication net). Dengan adanya jaringan di tingkat lokal ini, maka masing-masing stake holder akan selalu berhubungan (connecting) dan sharing komunikasi. Sehingga sirkulasi informasi akan bergulir lebih cepat, pilihan (option) informasi dapat lebih banyak dan dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) manakala akan terjadi suatu krisis, untuk cepat-cepat dapat diantisipasi penanganannya. Untuk membangun jaringan komunikasi sosial ini, maka harus diupayakan suatu sistem komunikasi yang didukung infrastruktur dan suprastruktur yang handal, misalnya: jaringan internet melalui komputer, piranti komunikasi dua arah yang cepat dan terpantau: HP, HT dan lain-lain.

Optimalisasi Fungsi Lembaga Informasi Formal di Tingkat Lokal

Diupayakan berdirinya lembaga informasi formal di tingkat lokal yang berupa dokumentasi, pencatatan dan pelaporan atau publikasi mengenai segala masalah yang dianggap penting di daerah itu. Melalui lembaga ini informasi itu harus dipublikasikan secara transparan (terbuka), cepat dan seluas-luasnya. Lembaga ini juga dapat diakses oleh siapapun yang ingin memperoleh informasi yang paling aktual tentang kondisi setempat.

Pembentukan Radio dan Televisi Publik di Tingkat Lokal

Seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Kebumen yang dalam waktu tak lama lagi akan memiliki TV Publik yang bersifat lokal. Dengan adanya media publik ini sangat dimungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dapat mewujudkan masyarakat informasi dan sebagai media pemersatu pluralisme berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan media penyiaran publik ini pula, akan dapat disiarkan informasi yang independen dan objektif, sehingga akan dapat menjadi referensi bagi publik dalam mengantisipasi perubahan yang sangat cepat. Dan tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya televisi dan radio publik yang bersifat lokal akan dapat difungsikan sebagai sarana bagi terjadinya debat politik publik dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi.

Penerbitan Tabloid Lokal

Sistem informasi yang berbasis pada masyarakat dapat pula diwujudkan dalam bentuk penerbitan tabloid lokal seperti apa yang saat ini dilakukan oleh warga masyarakat di Kota Gede, Yogyakarta. Atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakatnya maka mereka telah memiliki media informasi tercetak yang datang dari oleh dan ditujukan kepada warga komunitas lokal. Dalam tabloid lokal ini dapat ditampilkan isu-isu seputar masalah lokal. Disamping itu media ini juga dapat difungsikan untuk penguatan ekonomi lokal, dengan cara menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan

PENUTUP

Agar semua media maupun instrumen komunikasi yang ada itu dapat difungsikan secara optimal, maka yang tidak kalah pentingnya untuk dihindari adalah untuk tidak kembali terbiasa menyampaikan informasi bohong kepada masyarakatnya. Bagaimanapun sempurnanya komponen komunikasi yang digunakan, informasi akan tetap dianggap suatu kepalsuan jika isinya tidak mencerminkan kenyataan seperti apa yang terbesit dalam benak dan kemudian dipersepsikan khalayak. Tidak ada manfaatnya pesan yang muluk-muluk jika isinya tidak mendukung terjadinya perubahan iklim atau lingkungan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu harus dihilangkan atau minimal ditekan semua faktor objektif yang selama ini menghantui rakyat, yaitu frustrasi kronis, yang disebabkan oleh langkanya perlindungan hukum, hilangnya keadilan, lemahnya kejujuran, rendahnya kebebasan hak asasi.

Ketertiban, ketentraman, kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir dan batin yang dirasakan oleh masyarakat itulah yang merupakan sumber dan isi paling sahih dan terpercaya dari komunikasi yang kita dambakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamijoyo, S.S. 2001. Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi. *Jurnal Mediator*, Volume 2, Nomor 2, 2001, Fakultas Ilmu Komunikasi, UNISBA, Bandung.
- Johannesen, R.L. 1994. *Ethics in Human Communication*. Edisi ke-3, Prospect Height, III, Wa Velan Pers.
- Susanto, A. 1980. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Suwardi, P. 2002. *Televisi dan Imperialisme Budaya*. 40 th TVRI, Dari Pembebasan Menuju Pencerahan, FSP-TVRI, Jakarta.
- Tester K. 2003. *Media Budaya dan Moralitas*. Penerbit Juxtapose, Yogyakarta.